



1. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran ini diukur melalui “Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah”. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga responsif terhadap kondisi faktual dan kebutuhan nyata di daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, semakin baik kualitas dokumen perencanaan tersebut dalam menjawab tantangan pembangunan. Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diakomodir Prioritas Daerah}}{\text{Total Isu Strategis}} \times 100$$

2. Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sinergitas antara dokumen perencanaan daerah dan nasional menjadi krusial untuk menciptakan kesinambungan pembangunan, tingginya tingkat keselarasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menerjemahkan arah kebijakan pembangunan nasional ke dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan di tingkat daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat keterpaduan program lintas sektor dan wilayah. Sasaran ini diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Selaras dalam RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$

- b. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Diakomodasi dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$



- c. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Makro pada RPJMD}}{\text{Target Makro RKPD}} \times 100$$

- d. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target IKK pada RPJMD Per Urusan}}{\text{Target IKU Renstra PD}} \times 100$$

- e. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Kinerja Program pada RKPD}}{\text{Target Indikator Program di Renja PD}} \times 100$$

3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah.

Integrasi antara perencanaan pembangunan dan kinerja perangkat daerah menjadi tolok ukur penting efektivitas pelaksanaan pembangunan. Hal ini diukur dengan Indikator "persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja perangkat daerah". Semakin tinggi angka ini, semakin menunjukkan bahwa dokumen perencanaan benar-benar diimplementasikan oleh perangkat daerah sebagai acuan kinerja, indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang
Dijadikan Target/Sasaran Perangkat Daerah}}{\text{Total Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah}} \times 100$$

4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda

Sebagai lembaga perencana daerah, Bappeda memegang peran kunci dalam memastikan keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola organisasi Bappeda diukur melalui "Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah". Indikator ini mencerminkan seberapa baik Bappeda mendukung kebutuhan perencanaan perangkat daerah lainnya, baik dari sisi data, fasilitasi, maupun koordinasi.